

**ANALISIS KOMPARATIF MENURUT MUHAMMAD  
IQBAL DAN ALI ABDUR RAZIQ TENTANG KONSEP  
RELASI AGAMA DAN NEGARA**



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**FENI SABRINA**

**NPM: 1421020071**

**Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**ANALISIS KOMPARATIF MENURUT MUHAMMAD  
IQBAL DAN ALI ABDUR RAZIQ TENTANG KONSEP  
RELASI AGAMA DAN NEGARA**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**  
**Pembimbing II : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KOMPARATIF MENURUT MUHAMMAD IQBAL DAN ALI ABDUR RAZIQ TENTANG KONSEP RELASI AGAMA DAN NEGARA**

Oleh

**Feni Sabrina**

**1421020071**

Persoalan pertama dalam Islam pasca Rasulullah dalam sejarah adalah masalah politik, yakni masalah kepemimpinan negara, hal ini terjadi dikarenakan Rasulullah tidak memberikan keterangan yang jelas siapa yang menggantikannya sebagai pemimpin, dan apakah kelak Islam harus memiliki (mendirikan) sebuah negara dalam bentuk yang khusus bagi komunitas muslim yang wilayahnya sudah keseluruhan jazirah Arab, yang disatukan dengan prinsip kesatuan ilahi dan asas persamaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Konsep Relasi Agama dan Negara? Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Agama dan Negara? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan pendapat antara Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Konsep Relasi Agama dan Negara. Serta untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Agama dan Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku yaitu: Buku-buku Muhammad Iqbal dan

Ali Abdur Raziq, Al-Qur'an dan hadits, hasil seminar, makalah, majalah, akses artikel Internet.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Muhammad Iqbal berpandangan Tidak ada pemisahan agama dari negara. Karena agama dan negara merupakan dua aspek yang sangat berkaitan satu sama lainnya. Serta Ali Abdur Raziq berpandangan bahwa Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Jadi antara agama dan negara tidak ada hubungan atau kaitan sama sekali. Persamaannya sama-sama berpendapat bahwa agama merupakan Kepercayaan individu kepada spiritual dan seruan untuk taat kepada Allah. Serta negara merupakan mengurus tentang urusan-urusan dunia. Sedang perbedaannya Muhammad Iqbal berpendapat bahwa agama dan negara saling berkaitan sedangkan Ali Abdur Raziq berpendapat bahwa agama dan negara tidak ada keterikatan.







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF MENURUT  
MUHAMMAD IQBAL DAN ALI ABDUR  
RAZIQ TENTANG KONSEP RELASI  
AGAMA DAN NEGARA**

**Nama : Feni Sabrina  
NPM : 1421020071  
Program Studi : Siyasa (Hukum Tata Negara)  
Fakultas : Syariah dan Hukum**

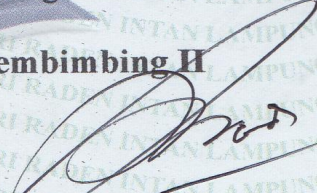
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. H. Faisal S.H., M.H.**  
**NIP. 195512251985031002**

**Pembimbing II**

  
**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**

**Ketua Jurusan,**

  
**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **ANALISIS KOMPARATIF  
MENURUT MUHAMMAD IQBAL DENGAN ALI ABDUR  
RAZIQ TENTANG KONSEP RELASI AGAMA DAN  
NEGARA**, disusun oleh **Feni Sabrina, NPM 1421020071**,  
Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), telah diujikan dalam  
sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Keguruan, pada hari/  
tanggal: **Jumat, 11 Mei 2018**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Jayusman, M.Ag.**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji II : Drs. Susiadi As., M.Sos.I.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

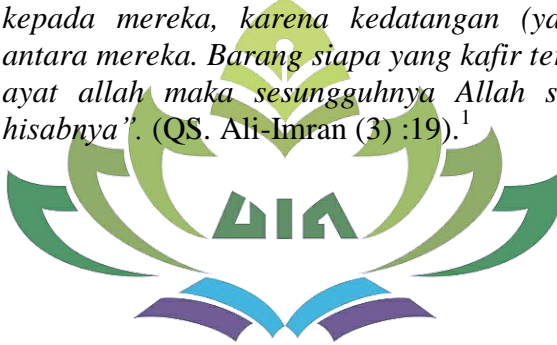
**Dr. Mamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَائِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah di Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedatangan (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya*”. (QS. Ali-Imran (3) :19).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'An dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 52.

## PERSEMBAHAN

Berdasarkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas limpahan karuniaNya, ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Muhammad Zikri dan Ibunda Emizarti yang selalu saya banggakan, hormati, dan sangat saya sayangi. Do'a tulus dan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, tenaga, pikiran, dan pengorbanan dalam mendidik, membesarkanku, dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, tanpa ada rasa lelah, selalu mengingatkanku untuk selalu bersyukur dan tidak pernah putus asa dalam meraih semua cita-cita dan harapanku, dalam ketulusan serta keikhlasan do'a mereka hingga menghantarkan ku menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Semoga Allah memuliakan mereka baik dunia maupun akhirat.
2. Adik-adik ku tersayang Yesi Rianti, Ahyatul Ridia, Vina Khairunnisa, Dion Meizan Sazeli yang selalu memberi inspirasi, motivasi serta semangat kepadaku. Semoga Allah juga kabulkan mimpi dan cita-cita kalian, semoga kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan.
3. Kepada Reza Efendi yang selalu memberi inspirasi, motivasi serta semangat kepadaku.
4. Kepada sanak saudara, family yang terus mendoakan keberhasilanku, memberikan semangat dan bantuan secara materil maupun formil dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Feni Sabrina yang lahir di Desa Pelita Sari Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tanggal 27 Januari 1996. Alamat Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Zikri dan Ibu Emizarti.

Adapun pendidikan yang penulis tempuh adalah: Pendidikan Formal pertama kali pada usia 6 tahun mulai masuk SDN 1 Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke pendidikan MTS NU Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke pendidikan SMKN 1 Pelayaran Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat selesai pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). Pada tahun 2017 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Praktik Pengadilan Semu (PPS) di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERBANDINGAN PENDAPAT MENURUT MUHAMMAD IQBAL DENGAN ALI ABDUR RAZIQ TENTANG AGAMA DAN NEGARA”**.

Penulis menyusun proposal skripsi ini, sebagai bagian dari salah satu tugas akhir. Fakultas syariah Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Alhamdulillah telah dapat penulis menyadari sepenuhnya sesuai dengan rencana.

Dalam penulis skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai selesai.
5. Untuk Sahabat-sahabat ku Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Evi Tamala, Okta Lisa, Yana Puspita, Farida Khoiriah, dan Semua teman-teman kelas A angkatan 2014 serta anak kosan ibu Jon, Ginda Epitamala, Susi Susanti, Heni Afrianti, Fatmawati dan lain-lain. yang

selalu memberi insprasi, motivasi, do'a serta semangat, dan mengajarkan ku betapa pentingnya tanpa harus menunda-nunda dan menyia-nyiakan waktu dalam menyelesaikan sesuatu.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Laampung serta seluruh staf yang telah meminjamkan buku guna keperluan ujian.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas amal dan kebaikan atas semua bantuan bantuan dan partisipasi semua pihak dalam menyelesaikan skripsi. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin



**Bandar Lampung,  
Penulis,**

**2018**

**FENI SABRINA**  
**NPM: 1421020071**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Agama dan Negara .....	15
B. Tujuan Agama dan Negara .....	24
C. Konsep Agama dan Negara .....	33
D. Dasar Agama dan Negara .....	37

### **BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD IQBAL DAN ALI ABDUR RAZIQ TENTANG AGAMA DAN NEGARA**

A. Biografi Muhammad Iqbal dan Karya-Karyanya.....	43
1. Biografi Muhammad Iqbal.....	43
2. Karya-Karya Muhammad Iqbal .....	49
B. Biografi Ali Abdur Raziq dan Karya-Karyanya.....	53
1. Biografi Ali Abdur Raziq .....	53
2. Karya-Karya Ali Abdur Raziq.....	57



C. Pandangan Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq Tentang Agama dan Negara.....	58
1. Pandangan Muhammad Iqbal Tentang Agama dan Negara.....	58
2. Pandangan Ali Abdur Raziq Tentang Agama dan Negara.....	61

#### **BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DAN ALI ABDUR RAZIQ**

A. Pandangan Pemikiran Muhammad Iqbal dan Ali Badur Raziq .....	67
B. Persamaan dan Perbedaan Muhammad Iqbal dan Ali Badur Raziq .....	69

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka penulis perlu adanya sesuatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“Analisis Komparatif Menurut Muhammad Iqbal Dengan Ali Abdur Raziq Tentang Konsep Relasi Agama dan Negara”**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Analisi Komparatif, Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-Musabab, duduk perkara, dsb).<sup>1</sup> Sedangkan Komparatif di artikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>2</sup>
2. Muhammad Iqbal adalah seorang pemikiran-penyair yang dilahirkan di Sialkot, Punjab, India tanggal 9 November 1877 dan wafat tanggal 21 April 1939<sup>3</sup>. Ia mempergunakan keahlian syairnya yang memiliki untuk menyatukan umat muslim dan mempercepat proses dimana umat islam dapat benar-benar memenuhi misi spiritual dan kulturalnya di dunia ini

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

<sup>2</sup><http://kbbi.co.id/arti-kata/komparatif> tanggal diakses 30 Mei 2018 Pukul 08:33 WIB

<sup>3</sup>A. Syafi'i Ma'rif, *Iqbal Barat dan Timur*, Republika Dialog Jum'at, 20 Februari, 1998.

3. Ali Abdur Raziq adalah salah seorang ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Ia dilahirkan di provinsi Mania, Mesir pada tahun 1888, ayahnya Hasan Abd Al-Roziq adalah seorang pasha besar yang berpengaruh dan mempunyai tanah yang luas. Ayahnya aktif dalam kegiatan politik dan menjadi wakil ketua Hizbul al-ummah (partai rakyat) pada tahun 1907.<sup>4</sup>
4. Konsep Relasi, konsep adalah pengertian, paham, pemikiran atau sebagai pokok pertama yang mendasari seluruh pemikiran.<sup>5</sup> Relasi adalah hubungan, perhubungan, pertalian banyak dengan orang lain.<sup>6</sup>
5. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.<sup>7</sup>
6. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>8</sup> Dipihak lain negara itu diartikan, sejumlah manusia yang mendiami suatu daerah (*territorial*) yang berada di wilayah tertentu dengan syarat manusia itu merdeka dan teratur, tunduk kepada suatu kekuasaan tertinggi di wilayah suatu pemerintah yang mempunyai hak dipertuan.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup>Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010), h. 443.

<sup>5</sup>Van Hove, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Baru, 1987), h. 1956.

<sup>6</sup><http://googleweblight.com/i/u=https://artikbbi.com/relasi/&hl=id-ID> diakses pada 28 Mei 2018 Pukul 13:26 WIB

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 15.

<sup>8</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 8.

<sup>9</sup>M. Usman, *Pembangunan Jiwa Negara dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Agus Salim, 1953), h. 83.

Dengan demikian kenegaraan yang penulis maksudkan adalah suatu penelaahan serta pemahaman secara rasional tentang ide-ide yang menjadi dasar suatu tindakan untuk dijadikan teori dalam pelaksanaan negara.

Dari penjelasan beberapa istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi tersebut adalah perbandingan tentang agama dan negara antara Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul **“Analisis Komparatif Menurut Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq Tentang Konsep Relasi Agama dan Negara”** ini yaitu:

Alasan Objektif :

1. Ingin lebih menguasai konsep perbandingan pendapat menurut Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq tentang Agama dan Negara.
2. Untuk mengkaji lebih dalam tentang Konsep kenegaraan Islam saat ini.

Alasan Subjektif:

1. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Siyasa.
2. Tersediannya literature yang menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Persoalan pertama dalam Islam pasca Rasulullah dalam sejarah adalah masalah politik, yakni masalah kepemimpinan negara, hal ini terjadi dikarenakan Rasulullah tidak memberikan keterangan yang jelas siapa



yang menggantikannya sebagai pemimpin, dan apakah kelak Islam harus memiliki (mendirikan) sebuah negara dalam bentuk yang khusus bagi komunitas muslim yang wilayahnya sudah keseluruhan jazirah Arab, yang disatukan dengan prinsip kesatuan ilahi dan asas persamaan.

Umat Islam berkumpul dan bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut, meskipun sedikit alot namun akhirnya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As Siddiq, RA menjadi khalifah pertama. Setelah Abu Bakar wafat Ummar Bin Khatab, RA menjadi khalifah kedua, dan selanjutnya Utsman Bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga. Di dalam pemerintah Utsman Bin Affan ini banyak terjadi perubahan yang radikal dalam aparatur pemerintahan, dimana terjadinya pergantian Gubernur oleh saudara dekatnya, adanya korupsi dan perlakuan tidak adil dalam menegakkan hukum, sehingga menimbulkan konflik yang sangat tajam. Sayid Amar Ali menjelaskan dalam bukunya *"The Spirit Of Islam"*, sebagai berikut:

Utsman tidak mempunyai kecerdasan Abu Bakar, dan tidak mempunyai tenaga intelek rasa moral Umar, dan keramahannya dan sikapnya menganggap enteng masalah segala masalah membuat ia menjadi alat yang mudah dipergunakan dalam tangan sanak keluarga.

Pemerintahan Utsman berakhir setelah ia terbunuh dengan para pemberontak dan akhirnya Ali Bin Abu Thalib di bay'at untuk menjadi khalifah yang keempat. Pada masa ini pun timbul pemberontakan yang mengakibatkan ia terbunuh, yang dipimpin oleh Abu Sofyan.<sup>10</sup> Dan akhirnya Umayyah Bin Abu Sofyan mengambil alih kursi kekhalifahan serta menggantikan corak pemerintah dari demokrasi dalam bentuk republik (dimana pada masa khulafaurrasyidin khalifahan dipilih melalui proses musyawarah dan bay'at) menjadi otokrasi atau monarki (kejadian berdasarkan turun-menurun).

---

<sup>10</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Tp. Raja Grafindo Persada), h. 38.

Dinasti Umayyah akhirnya dapat diruntuhkan karena menjadi pemerintahan secara absolut dan penuh kemungkinan oleh bani Abbasiyah yang selanjutnya mendirikan dinasti Abbasiyah, namun meskipun bercorak kerajaan, dinasti ini memerintah secara adil dan penuh kearifan serta perkembangan intelektual terus ditingkatkan sehingga dinasti ini mampu mengantarkan peradaban Islam kepada puncak keemasannya.<sup>11</sup>

Barat mulai menyadari masa kegelapannya dengan perlahan-lahan namun pasti mereka mengorbankan semangat *seinaisen* peradabannya dan mencoba menyusup kedalam dinasti tersebut. Dengan sistem adu domba akhirnya berangsur-angsur terjadi perpecahan didalamnya sehingga kekuatan dan kebebasan dinasti tersebut porak poranda, oleh karenanya bangsa mongol dengan mudah dapat meruntuhkan dinasti Abbasiyah. Demikian juga tiga kerajaan besar Islam penggantinya, Turki Utsmani, Saffawiyah dan mughol pada abad ke-17 dapat ditaklukan oleh barat dengan keunggulan peradabannya. Hal ini dikarenakan ketiga kerajaan besar tersebut tidak mampu dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan modernitas yang dibutuhkan pada masa itu.

Tantangan ini menimbulkan persoalan baru identitas umat Islam itu. Ada kekeliruan apakah dalam Islam sehingga seolah-olah telah asing, mandul dalam urusan politik kecuali ibadah, dan tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan modernitas. Dari persoalan-persoalan inilah titik awal bangkitnya para *revormer* modern Islam untuk menata kembali kebangkitan islam (*Islamic Renaissance*) dan menerapkan kembali faham Islam yang modern (*Islamic Fundamentalism*). Para *revormer* Islam modern tersebut di antaranya, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul dan Rasyid Ridha (di Mesir) serta Sir Sayyid Ahmad khan (di India).

---

<sup>11</sup>*Ibid.* h. 42-44.

Secara berangsur-angsur pada awal abad ke 20 keadaan politik berubah dengan timbulnya gerakan-gerakan kemerdekaan yang dipelopori pembaharuan tersebut. Negara-negara Islam Nasional yang merdeka bermunculan, namun sebagian besar negara Islam tersebut mengikuti pola modernisasi ala barat sekuler karena persoalan-persoalan yang mendasar mengenai keberibadian Islam tidak terpecahkan oleh mereka.

Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq Muncul sebagai salah seorang pemikir modern di pertengahan abad ke-20. Di antara kedua pemikir ini memiliki perbedaan pandangan mengenai Agama dan Negara. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjabi Barat Laut pada tanggal 09 November 1877, keluarga Iqbal berasal dari Khasmir.<sup>12</sup>

Iqbal adalah seorang pemikir dan penyair.<sup>13</sup> Muhammad Iqbal berpendapat bahwa politik lebih dekat kepada Barat dibanding kepada Timur Islam. Ia bertolak belakang dengan Muhammad Abduh yang lebih dekat pada Timur Islam dibanding kepada Barat dan peradabannya.

Iqbal berpendapat bahwa Islam sendiri menawarkan kepada kita demokrasi spiritual yang merupakan tujuan Islam modern. Alasannya manusia membutuhkan tiga hal:

1. Penafsiran semesta dengan pendekatan spiritualis untuk sampai kepada Allah.
2. Proses liberasi spirit individu dan inilah yang menyampaikannya pada konsep demokrasi.
3. Prinsip dasar yang mengarahkan perkembangan masyarakat manusia pada perkembangan spiritualitas.

Islam memuat undang-undang politik yang menuntut ketaatan kepada Allah. Negara dalam pandangan Islam tak

---

<sup>12</sup>Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 261.

<sup>13</sup>M.M. Sharif, *Iqbal (Tentang Tuhan dan Keindahan)*, Terjemahan Yusuf Jamil, (Bandung: Mizan, 1984), h.26.

lain sekedar sarana untuk mewujudkan spiritualitas dalam pembangunan masyarakat manusia. Oleh karena itu, negara bukan sekedar suatu institusi kedaulatan materialistik dan pemimpin bumi. Maksudnya negara Islam menganut bentuk teokrasi. Dengan demikian, seorang kepala negara Islam sangat memungkinkan dikritik dan ditentang oleh masyarakat muslim. Ini bertolak belakang dengan negara-negara di Eropa yang menyembunyikan kesewenangan-wenangannya di bawah proteksi bentuk teokrasi Eropa.

Iqbal tidak setuju terhadap pemisahan agama dengan negara karena pemisahan Allah dari alam dunia berarti pemisahan agama dari negara di dunia manusia. Pemisahan di sini sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, hakikat itu satu, yakni sesuatu yang bersumber dari Allah dan manifestasinya tampak di dunia materi yang pada dasarnya ciptaan Allah juga.<sup>14</sup>

Sedangkan Ali Abdur Raziq adalah salah seorang ulama Al-Azhar Asy-Syarif. ia berpendapat bahwa Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Melalui proyek ajakan reformasi pemikiran agamanya, ia menuntut pemisahan agama dari negara. Islam hanyalah seruan agama untuk menyembah Allah. Wilayah Islam hanyalah seputar agama dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, social, ekonomi, dan lainnya. Abdur Raziq berkata, “Islam tidak mengurus pemerintahan atau negara atau kecenderungan-kecenderungan politik. Islam datang hanya membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memang tidak memberikan perhatian kepadanya. Demikian pula rasul”<sup>15</sup>.

Atas dasar ini Abdur Raziq adalah orang yang pertama kali menyerukan pemisahan agama dari negara. Ia

---

<sup>14</sup>Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010), h. 441- 443.

<sup>15</sup>Ali Abd Ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan (Kajian Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam)*, Terjemahan Al-Islam Wa Ushul Al-Hukum Diterjemahkan M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 123.



berpendapat bahwa Islam tak lebih dari kepercayaan individual spiritual dan tidak memberi perhatian terhadap keduniaan atau politik atau sosial. Risalah Nabi telah berakhir begitu beliau wafat. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya baik menyangkut risalah maupun klaim-klaimnya. Abdur Raziq melihat rasulullah dari dua sisi. Pertama, ia adalah utusan yang diberi wahyu dan pembawa risalah langit. Kedua, ia adalah seorang pemimpin politik untuk negara Madinah. Bahkan, ia adalah pemimpin politik pertama dalam Islam. Oleh karena itu, Abdur Raziq menolak seruan ajakan mendirikan lembaga Khilafah atau amanat besar. Ia berkata, “Sesungguhnya Khilafah sama sekali tidak memiliki landasan-landasan dari agama. Khilafah bahkan kebalikan agama dan bertentangan dengan prinsip-prinsipnya.”<sup>16</sup>

Sedangkan asumsi penulis tentang agama dan negara yaitu saling keterikatan. Memang, istilah negara tidak disinggung dalam Al-Qur'an maupun sunnah tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Umpamanya Al-Qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosial politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk didalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, dan kehakiman. Dalam Al-Qur'an juga biasa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang atau upaya untuk menciptakan perdamaian dan menghukum tindakan kriminal. Dalam Al-Qur'an *Siyasah Al-Syar'iyah* penegakan negara sebagai tugas suci yang dituntut oleh

---

<sup>16</sup>Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010), h. 443-444.

agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekati manusia kepada Allah.<sup>17</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok persoalan yang akan dijadikan pokok pembahasan yang pada dasarnya telah terkandung dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Konsep Relasi Agama dan Negara?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Konsep Relasi Agama dan Negara?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbandingan pendapat antara Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Konsep Relasi Agama dan Negara.
- b. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Agama dan Negara.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan tentang perbandingan pendapat antara Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq.

---

<sup>17</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 49-50.

- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Suatu peneliti diperlukan metode untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga dapat di uji kebenarannya, dan untuk mempermudah mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensi, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (Library research). Penelitian pustaka adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun buku laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data primer.<sup>18</sup>

Kemudian sifat penelitian ini yaitu deskriptif komparatif, yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, (gambaran), atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada

---

<sup>18</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung , 2015), h. 10.

dan penomena tertentu.<sup>19</sup> Komparatif yaitu berkenaan dengan atau berdasarkan perbandingan.

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif (gambaran), atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau penomena tertentu lalu dapat diperbandingkan.

Dalam penliatan ini akan digambarkan bagaimana agama dan negara menurut Muhammad Iqbal kemudian dibandingkan dengan agama dan negara menurut Ali Abdur Raziq.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana itu diperoleh.<sup>20</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri:

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti atau digambarkan ketika permasalahan terjadi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Al-qur'an dan hadits, Buku-buku Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu buku-buku, hasil seminar, makalah, majalah, akses artikel internet.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi

---

<sup>19</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h. 58.

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruangan perpustakaan.<sup>21</sup> Teknik kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca buku, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>22</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan secara relevan untuk menjunjung penyelesaian pokok permasalahan.

#### 4. Metode pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. pemaknaan data (Meaning), yaitu memperhatikan setiap kata yang terdapat dalam tulisan.
- c. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis Data (Systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Cet Ke VII, (Bandung: Bandar Maju, 1996), h. 33.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

<sup>23</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: TP.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 23.



Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi data dengan mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan/tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yang artinya “ Menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumbang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk di interpretasikan data dan pemahaman hasil analisis”.<sup>24</sup> Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode sebagai berikut: Metode komparatif yaitu cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan dan persamaan antara pendapat menurut Muhammad Iqbal dengan Ali Abdur Raziq tentang Agama dan Negara”.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 127.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Agama dan Negara

##### 1. Pengertian Agama

Defenisi agama secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu: “a” berarti tidak ada “gama” berarti kacau, jadi agama mengandung arti tidak kacau.<sup>1</sup> *Dalam Kamus Besara Bahas Indonesia*, agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan.

Agama juga dikenal dengan istilah *Din* dan *Religion* yang pada umumnya dianggap memiliki pengertian yang sama dengan agama. Dalam terminologi arab, agama biasa disebut dengan kata *Al-Din* atau *Al-Millah* yang berarti mengikat, maksudnya adalah mempersatukan segala pemeluknya dan mengikat dalam satu ikatan yang erat.<sup>2</sup> *Al-Din* juga berarti undang-undang yang harus dipatuhi.

*Al-Din* yang biasanya diterjemahkan dengan agama, menurut guru besar Al-Azhar Syaikh Muhammad Abdullah Badran, adalah menggambarkan suatu hubungan antara dua pihak dimana pihak yang pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang

---

42. <sup>1</sup>Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.

50. <sup>2</sup>Hasbi Ash-Shiddieq, *Al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1952), h.

kedua. Dengan demikian agama merupakan hubungan antara manusia dan tuhan.<sup>3</sup>

Secara terminologis, agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya.<sup>4</sup>

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu orang sering mendefenisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang di anutnya. Menurut Mukti Ali, mantan menteri agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Esa. Dan hukum-hukum yang di wahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut James Martineau, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.<sup>6</sup>

Friendich schleiermacher, menegaskan bahwa agama tidak dapat dilacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral, akan tetapi agama berasal dari perasaan ketergantungan mutlak kepada yang tidak terhingga.<sup>7</sup>

Dari pengertian agama dalam berbagai bentuknya itu maka terdapat bermacam-macam defenisi agama. Merumuskan defenisi agama merupakan bagian dari

---

<sup>3</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 210.

<sup>4</sup>Ayi Sofyan, *Op.Cit.* h. 43.

<sup>5</sup>Jalaludin Rahmat, *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*, (Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 2004), h. 20.

<sup>6</sup>*Ibid.* h. 21.

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 22.

problema mengkaji agama secara ilmiah. Banyaknya definisi tentang agama malah mengaburkan apa yang sebenarnya hendak dipahami dengan agama.<sup>8</sup>

Namun sebagai gambaran, Harun Nasution telah mengumpulkan beberapa macam definisi agama yaitu:

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuasaan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuasaan gaib yang menguasai manusia.
- c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- d. Kepercayaan pada suatu kekuasaan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- e. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari satu kekuatan gaib. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.
- f. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- g. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.<sup>9</sup>

Negara adalah ikatan manusia yang dilengkapi kekuasaan memerintah dan memaksa berdasarkan sistem hukum. Jellinek menyatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memerintah dengan hukum. Sementara

---

<sup>8</sup>Adeng Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama*, (Bangung : CV Pustaka Setia, 2004), h. 23.

<sup>9</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, (Jakarta: UI Perss, 1985), h. 2-3.

hukum, seperti disampaikan Paul Laband adalah kumpulan perintah dari negara yang harus ditaati.<sup>10</sup>

Ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu agama, din dan religion. Agama yang semula berasal dari suatu konsep yang konotasinya lebih dekat kepada Hindu dan Budha. Tetapi, penggunaan istilah itu dalam masyarakat Indonesia sudah berkembang dan digunakan untuk sebagai suatu istilah umum yaitu untuk berbagai agama sekedar memudahkan orang untuk berkomunikasi. Namun, perlu ditegaskan apabila digunakan istilah agama Islam maka yang dimaksud di sini adalah al-din al-Islami yaitu suatu konsep agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Istilah din atau adyan dapat diterjemahkan sebagai agama (Tunggal) atau agama-agama (jamak). Namun, perlu diketahui konsep din (agama pada umumnya) dengan ad-din yang dapat dipahami hanya mempunyai konotasi dengan agama Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat Ali-Imran (3) : 19.<sup>11</sup>

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا  
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بَعَايَتِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah di Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena*

<sup>10</sup>H. Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 163.

<sup>11</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2004 ), h. 18-19.



*kedatangan (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya". (Qs. Ali-Imran (3) :19).*<sup>12</sup>

Juga dalam Hadits Nabi: "ad-din as-siyasah". Artinya, "Agama Islam itu (mencakup) politik". Istilah religion yang digunakan dalam bahasa Inggris menurut pemikiran umum di barat adalah Ikatan manusia dengan tuhan atau Tuhan-tuhan saja.<sup>13</sup>

Perkenalan para ilmuwan Islam dengan alam pikiran Yunani semakin meluas dan mendalam. Proses ini menimbulkan masalah kenegaraan secara rasional sehingga memunculkan sejumlah pemikir Islam beserta gagasannya, seperti Syihab Ad-Din Ahmad ibn Abi Rabi' disusul Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibn Taimiyyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Mereka dianggap sebagai eksponen yang mewakili pemikiran politik umat Islam pada zaman pertengahan.

Negara dan agama menurut pandangan Ibn Taimiyah, ialah saling berkaitan menjadi satu. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani.<sup>14</sup>

Tema mengenai politik dalam hal ini yaitu hubungan agama dan negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkepanjangan dikalangan para ahli.<sup>15</sup> Hal ini

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'An dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 51.

<sup>13</sup>Muhammad Tahir Azhary, Op.Cit, h. 19.

<sup>14</sup>Jhon I. Esporsito, *Islam and Politics*, Terj. H.M Josoeff Sou'yb, "Islam dan Politik", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 38.

<sup>15</sup>Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet.Ke-1, 2000), h. 58.

disebabkan oleh perdebatan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau agama merupakan bagian dari digma agama. Bahkan dikatakan bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama kalinya dalam hubungan umat Islam adalah berkaitan dengan masalah hubungan agama dengan negara.<sup>16</sup>

Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Negara

Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing adalah sebagai berikut (a) *Staat* bahasa Belanda yang artinya negara; (b) *State* bahasa Inggris yang artinya negara; (c) *E'tat* bahasa Perancis artinya negara. Kata *staat* (state, e'tat) tersebut diambil dari bahasa Latin yaitu *status* atau *statum* artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan.<sup>18</sup> Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet.K-1, 1999), h. 9.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 15.

<sup>18</sup>M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h. 1.

<sup>19</sup>A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 119.

Sebagaimana diketahui, tidak ada suatu definisi yang disepakati tentang negara. Namun, secara umum mungkin dapat dijadikan sekedar pegangan sebagai mana lazim dikenal dalam hukum internasional bahwa suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yaitu:

- a. Rakyat atau sejumlah orang
- b. Wilayah tertentu
- c. Pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat

Sebagai unsur komplementer dapat ditambahkan pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain.

Negara adalah sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikanannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial) tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya, karena itu manusia dalam menjalin hidup ini harus sesuai dengan perintah-perintahnya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa manusia harus selesai memperhatikan dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagaimana diajarkan dalam Islam.<sup>20</sup>

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>21</sup> Di pihak lain negara itu diartikan, sejumlah manusia yang mendiami suatu daerah (territorial) yang berada di wilayah tertentu dengan syarat manusia itu merdeka dan teratur, tunduk kepada

---

<sup>20</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 17.

<sup>21</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 8.

suatu kekuasaan tertinggi di wilayah suatu pemerintah yang mempunyai hak dipertuan.<sup>22</sup>

Menurut Roger H. Soltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.<sup>23</sup>

Perkembangan di masa klasik, negara sudah diorientasikan kepada ketuhanan. Negara merupakan entitas yang berhubungan dengan agama. Demikian pula yang dikonsepkan oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun keduanya mendefinisikan negara sebagai misi kelanjutan Nabi untuk melindungi agama dan mengatur dunia.

Para ahli di Indonesia sendiri terdapat beberapa pendapat tentang definisi negara., menurut M. Tahiri Azhari, negara adalah sesuatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikan bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai Khilafah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya.<sup>24</sup>

Pada abad sebelum masehi, Plato, dan Aris Toteles telah memperkenalkan beberapa teori-teori negara, namun pengertian negara pada waktu itu barulah meliputi tentang kota atau negara kota yang disebut polis. Didalam bukunya tentang kenegaran “Politeia” yang terkenal dengan “Republic” Plato mengatakan, “Negara ialah suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan keabadian hidup manusia”.<sup>25</sup> Sedangkan Socrates mengatakan juga dalam Republicnya Plato bahwa:

---

<sup>22</sup>M. Usman Al Muhammadiyah, *Pembangunan Jiwa Negara dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Agus Salim, 1953), h. 83.

<sup>23</sup>Miriam Budiardjo, *Op. Cit.* h. 49.

<sup>24</sup>M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h. 3.

<sup>25</sup>J.H. Rapat, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1988), h. 59.

Negara bukanlah organisasi yang dapt dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, tetapi negara ialah susunan obyektif yang bersandarkan hakekat manusia dan karena itu bertugas untuk melaksanakan hukum-hukum yang obyektif mengandung keadilan bagi umum, dan jangan semata-mata melayani kebutuhan penguasa saja yang berganti orangnya.<sup>26</sup>

Selanjutnya Aris Toteles, Filsuf Yunani menerangkan, “Negara ialah keluarga rumah tangga yang merupakan dasar dari pemimpin negara, dimana dari beberapa keluarga bedirilah suatu kampung, kota, provinsi dan kemudian menjadi suatu negara.”<sup>27</sup>

Kalau dilihat dari uraian di atas, nampaknya negara pada zaman klasik lebih menekankan kepada kebajikan, keadilan, etika dan kebebasan persatuan dalam berbagai segi hubungan antara warga dengan negara. Karena dari keempat unsur itulah individu atau masyarakat termasuk penguasa negara dibedakan dari makhluk lain.

Tegasnya, baik-baik atau buruknya negara tergantung pada kesadaran etika politik warga negaranya. Negara pada zaman modern tentu berbeda dengan negara pada zaman klasik. Di mana negara modern lebih menegaskan titik tumpunya pada masalah individual dan hak-haknya yang berfokus kepada kebebasan, kewibawaan, kekuasaan, hak asasi, kewajiban, konsensus, demokrasi, dan keadilan. Semua penekanan tersebut tentu selaras dengan perkembangan situasi yang dihadapi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa konsep negara menurut tokoh dibawah ini:

- a. Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa, “Negara itu adalah sekumpulan manusia yang berjanji

---

<sup>26</sup>M. Usman Al Muhammady, *Op. Cit*, h. 80.

<sup>27</sup>V. Situmorang, *Intisari Ilmu Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),

akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka.”

- b. Jhon Locke (1631-1704) menerangkan, “Negara adalah organisasi yang menjamin hak-hak asasi dari setiap orang atas gangguan siapapun.”
- c. J.j. Rosseau (1712-1788) menyatakan, “Negara adalah perserikatan rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak-hak masing-masing yang hidup bebas mereka.”<sup>28</sup>

Berdasarkan konsep negara di atas dapat dilihat bahwa terbentuk suatu negara hanya merupakan suatu alat untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia dari tekanan maupun gangguan yang berbentuk apapun, namun juga disisi lain negara dijadikan suatu alat untuk mendapatkan, dan melindungi setiap hak masing-masing dari seseorang untuk hidup bebas tanpa tekanan dari siapapun.

## **B. Tujuan Agama dan Negara**

Tujuan adalah suatu perkara yang sangat penting untuk menentukan tujuan tiap-tiap perbuatan. Tujuan adalah penentuan tiap gerak atau tingkah laku sebagaimana dalam setiap organisasi (kekuasaan) yang mempunyai tujuan tertentu.

Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera. Arti Negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata pemerintah. Jadi negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya (pemerintah) yang mengantarkan semua penumpangnya (rakyat) menuju ke pelabuhan yang sejahtera.

Menurut Plato dalam bukunya Republik, menulis bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>28</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 11.



umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya.<sup>29</sup>

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold J. Laski tujuan negara ialah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat menciptakan terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.<sup>30</sup>

Tujuan negara menurut Shang Yang ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya. Shang Yang mengatakan kalau orang ingin membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin dan sebaliknya jika orang hendak membentuk rakyatnya kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya lemah.<sup>31</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno, apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>*ibid*, h. 53-54.

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 54.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 54-55.

<sup>32</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 314.

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negara ialah

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan dua tujuan positif sebagai amar al-ma'ruf yang perlu diwujudkan bersama melalui pelebagaan negara Indonesia itu. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan peran negara dalam rangka perlindungan internal dan ketertiban dunia eksternal, bersifat negatif dalam rangka nahi al-munkar terhadap segala bentuk ancaman dan tantangan yang perlu dicegah dan ditanggulangi atau dihadapi dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>33</sup>

Menurut ajaran Islam tujuan negara adalah terlaksananya ajaran-ajaran Al-quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materil dan spiritual perseorangan dan kelompok serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Al-Quran Surat Al-Hajj (22) ayat 41 menyatakan:<sup>34</sup>

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ مُؤَافَا الصَّلَاةِ وَآتَاوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

<sup>33</sup>Jumli Asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta:Pusat Studi HTN FH UI, 2004), h. 52-53.

<sup>34</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 58.

Artinya: “Orang-orang muslim itu ialah yang jika kami beri mereka kedudukan kuat di muka bumi mereka mengerjakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat kebajikan, dan melarang berbuat kemunkaran; dan kepada allahlah kembali segalanya urusan.”<sup>35</sup>

Kemudian dalam Surat Ali ‘Imran (3) ayat 110 Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “kamu (umat Islam) adalah Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentunya itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”<sup>36</sup>

Kewajiban pertama atas seorang penguasa dan pemerintahnya dalam negara Islam ialah menegakkan sistem kehidupan Islam dengan atasnya memerintahkan segala yang ma’ruf menebarkan kebaikan dan mencegah kemunkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan ukuran nilai-nilai akhlak Islam.<sup>37</sup>

Rasulullah Saw. Pernah bersabda: “melalui negara Allah membasmi semua yang tidak dapat dibasmi melalui

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’An dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 337.

<sup>36</sup>*Ibid.* h. 64

<sup>37</sup>Ni’matul Huda, Op. Cit. h. 58.

Al-Qur'an." Almaududi menegaskan bahwa Artinya kejahatan yang tidak dimusnahkan melalui ajaran-ajaran Al-Quran membutuhkan kekuasaan memaksa dari negara untuk membasminya. Hal ini berarti tujuan utama suatu negara Islam adalah untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia.<sup>38</sup> Hanya menegakkan perdamaian, melindungi batas-batas wilayah negara, berusaha untuk meningkatkan taraf hidup orang awam, bukanlah tujuan akhirnya dan bukan pula merupakan ciri khas yang membedakan negara Islam dari negara non Islam. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa negara telah mengagalkan atau memasyarakatkan praktik-praktik kebajikan yang diperhatikan islam untuk dianut umat manusia, dan membasmi serta mendobrak dengan kekuatan penuh semua kejahatan yang ingin dibasmi Islam dari umat manusia.<sup>39</sup>

Agar tujuan negara tersebut dapat terlaksana maka menurut Ahmad Azhar Basyir ada beberapa asas ajaran Islam mengenai kehidupan bernegara yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

#### 1. Musyawarah

Hidup bernegara merupakan penyelenggaraan kepentingan bersama bukan perseorangan. Oleh karena itu, pengelolaan negara pun menjadi kepentingan bersama pula. Menurut ajaran Islam, musyawarah merupakan asas terpenting dalam kehidupan bernegara. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 ditentukan sebagai berikut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), H. 156.

<sup>39</sup>Ni'matul Huda, *Op. Cit.* h. 59.

<sup>40</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h. 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang dengan itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya*”.<sup>41</sup>

Diletakkannya perintah taat kepada ulil amri setelah perintah taat kepada Allah dan Rasulnya itu mengandung ajaran bahwa kewajiban taat kepada ulil amri itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa ulil amri dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasulnya dalam sunnah.

Maududi menegaskan bahwa apabila ulil amri (negara) memaksa untuk melanggar perintah Allah serta batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Saw, maka negara kehilangan haknya untuk menuntut ketaatan dari rakyatnya.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 87.

<sup>42</sup>Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 59-60.

## 2. Keadilan

Dasar kedua yang merupakan tumpuan bangunan negara ialah keadilan. Di dalam Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 58 sebagai berikut:<sup>43</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”

Di dalam Al-Qur'an Surah Asy-syura ayat 15 sebagai berikut:

قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِغَايَتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “*Allah berfirman: “jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu) maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami (mukjizat-mukjizat) sungguh, kami bersamamu mendengarkan (apa yang mereka katakana)”*”<sup>44</sup>

Allah memerintahkan kepada Rasulullah Saw. Agar mengumandangkan: “*dan aku diperintahkan untuk supaya berlaku adil di antara kamu*”, yakni aku telah

<sup>43</sup>Ibid. h. 61.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 367.



diperintahkan untuk bertindak adil tanpa memihak, maka bukanlah watak ku untuk bersikap fanatik kepada semuanya adalah sama, yaitu hubungan keadilan dan kejujuran.

### 3. Persamaan

Dasar ketiga yang mencakup dalam pengertian-pengertian yang berakar dalam negara Islam, yaitu bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Prinsip ini terutama menyangkut hak diperlakukan sama dalam terpenuhinya hak-hak asasi manusia.<sup>45</sup>

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 55 Allah Swt. berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  
فِي الْأَرْضِ كَمَا أَستَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ  
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya

<sup>45</sup>Ni'Matul Huda. *Op. Cit.* h. 61-62.

*untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.*<sup>46</sup>

Dari ayat ini setidaknya-tidaknya ada dua masalah fundamental yang dapat diambil yaitu: pertama, Islam menggunakan yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Sehubungan dengan pengertian terakhir ini, siapa pun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah (pengganti) Tuhan yang Maha Kuasa dan ia tidak mempunyai otoritas atas sesuatu, kecuali yang telah didelegasikan kepadanya.

Kedua, kekuasaan untuk mengatur bumi, bukan memakmurkannya untuk mengelola negara dan untuk mensejahterakan masyarakat dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu.<sup>47</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Pemerintah

Dasar keempat yang amat penting bagi negara Islam ialah bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat adil dan benar-benar beriman. Dan tidak ada seorang pun berhak menggunakannya dengan cara-cara yang diragukan atau demi kepentingan pribadi.

---

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 357.

<sup>47</sup>Ni'Matul Huda. *Op. Cit.* h. 61-63.

Seseorang yang ditunjuk oleh rakyat untuk mengelola urusan pemerintah berarti bahwa ia mendapatkan tugas-tugas administrative yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, tidak lebih dari itu. Jadi ia bertanggung jawab kepada Allah di satu pihak dan di lain pihak ia bertanggung jawab kepada khalifah-khalifah lainnya (rakyat pada umumnya) yang telah mendelagrasikan otoritas mereka kepadanya. Dengan demikian, seorang pemimpin negara yang mendudukan dirinya sebagai penguasa absolut yang tidak mau bertanggung jawab kepada rakyatnya, ia bukan lagi seorang khalifah tetapi seorang pemerkosa hak-hak rakyat.<sup>48</sup>

#### 5. Kebebasan

Asas kebebasan akan mempunyai makna dan di samping itu terdapat asas kebebasan yang meliputi kebebasan pribadi, kebebasan mengemukakan pikiran dan kebebasan beragama.<sup>49</sup>

### C. Konsep Negara dan Agama

Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dengan perkataan lain, abstrak suatu gejala (fenomena) atau fakta konkret melahirkan konsep.<sup>50</sup>

Agama dan negara, adalah dua buah institusi yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya.<sup>51</sup> Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya. Dalam hal ini agama dijadikan sebagai alat

<sup>48</sup>*Ibid.* h. 64-65.

<sup>49</sup>*Ibid.* h. 65.

<sup>50</sup>Hotma P.Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 32.

<sup>51</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 54.

ukur atau pembenaran dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama itu sendiri, pada sisi lain negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan memaksa bagi setiap masyarakat. Biasa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan berlawanan dengan agama.<sup>52</sup>

Islam adalah sebuah ideologi politik yang menonjol. Misalnya Islam melaksanakan suatu fungsi integratif dalam sistem-sistem politik negara timur tengah. Islam juga memiliki potensi untuk memainkan peran yang menghancurkan yang kemudian mengadopsi sikap tidak toleran terhadap kelompok-kelompok minoritas.<sup>53</sup>

Islam adalah agama universal, agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*. Islam juga memberikan konsep kepada manusia mengenai mengenai persoalan yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara mengatur perkononmian, penegakan hukum, konsep politik dan sebagainya. Salah satu bukti tercaat dalam sejarah, ketika nabi hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menyatukan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai agama dan peradaban yang berbeda dalam satu tatanan msyarakat Madani.

Para pemikir politik Islam abad pertengahn banyak mengadopsi pemikiran Plato dan Aris toteles mengenai konsep terbentuknya negara, seperti yang dikatakan Al-Ghazali, manusia tidak dapat hidup sendiri disebabkan oleh dua faktor:

*Pertama*, kebutuhan terhadap keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. *Kedua*, saling bantu

---

<sup>52</sup>Jhon L. Esposito, *Islam and Politics*, Terj. H.M Josoeff Sou'yb, "Islam dan Politik", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 38.

<sup>53</sup>Jhon L.Esposito, *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 38.

membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak.<sup>54</sup> Dua faktor tersebut yang baik antar sesamanya, untuk itu diperlukan tempat tertentu dan dari sinilah lahir suatu negara.

Untuk kepentingan ini ahamma dijadikan landasan bagi kehidupan kenegaraan. Dari sinilah kemudian muncul jargon politik Islam : Al-Islam huwa al-din wa al-daulah (Islam adalah agama dan negara), yang berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara disisi lain terdapat kelompok sekunder, yang secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan negara Islam di dunia ini. Pemegang konsep ini memandang bahwa agama adalah urusan akhirat, sedangkan negara adalah urusan dunia.

Menurut Din Syamsuddin, secara umum ada tiga bentuk paradigm tentang hubungan agama dan negara.

#### 1. Paradigma Integralitik

Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.

#### 2. Paradigma Simbiotik

Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dengan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Aliran pemikiran ini menyadari, istilah negara (dawlah) tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an

---

<sup>54</sup> Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 20.

yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat incidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa “Al-Qur’an bukanlah buku tentang ilmu politik.”<sup>55</sup>

### 3. Paradigma Sekuleristik

Paradigma ketiga ini bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara.<sup>56</sup> Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran agama pada negara atau menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu negara. Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaruhnya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain memalukan intervensi.

Secara umum, polarisasi kecenderungan para pemikir politik Islam dalam memandang konsep negara dapat dikelompokkan menjadi berikut:

#### a. Skriptualistik dan Rasionalalistik

Kecenderungan skriptualistik menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran terhadap Al-Qur’an dan Hadits yang mengandalkan pengertian bahasa. Adapun kecenderungan rasionalistik menampilkan penafsiran yang rasional dan kontekstual.

---

<sup>55</sup>Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 60.

<sup>56</sup>Abdul Mun’im D.Z., *Islam di Tengah Arus Transisi*, (Jakarta: Kompas, 2000), h. 9.



#### b. Idealistik dan Realistik

Pendekatan idealis cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Kaum idealis cenderung menolak format kenegaraan yang ada, sedangkan kaum realis cenderung menerimanya karena orientasinya bersifat realistik terhadap kenyataan politik.

#### c. Formalistik dan substantivistik

Pendekatan foramalistik cenderung mementingkan bentuk dari pada isi, yang menampilkan konsep negara dan simbolistik keagamaan. Sebaliknya, pendekatan substantivistik cenderung menekankan isi dari pada bentuk.<sup>57</sup>

### D. Dasar Agama dan Negara

Setelah berakhirnya sistem khalifan di Turki (1924) dunia Islam sudah ramai membicarakan konsep Negara Islam, selama masa perjuangan Barat, umat Islam tidak mampu berfikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai berbagai masalah.

Negara-negara Islam pada pasca perang Dunia II, setelah merdeka banyak yang mengadopsi peradaban Barat, mereka beranggapan westemisasi disegala bidang kehidupan adalah jalan keluar dari kelemahan dan keruwetan nasional, dan sebagian ada yang mengambil sosialisme sebagai ideology mereka dan berusaha menerapkan kapitalisme sebagai ideology mereka dan berusaha menerapkan kapitalisme atau demokrasi liberal dinegaranya. Namun semua proses imitasi tersebut tidak

---

<sup>57</sup>Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), H. 50.

memberikan hasil yang positif dan tidak membawa manusia kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin.<sup>58</sup>

Ini disebabkan, *pertama*, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah yang paling mengesakan sepanjang sejarah umat manusia. *Kedua*, sepanjang sejarah, hubungan antara kaum Muslim dan non-Muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan penuh ketegangan.<sup>59</sup>

Dalam hal ini memang kita tidak menemukan suatu perintah dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits agar mendirikan daulah islamiyah (negara Islam). Akan tetapi justru disinilah letak keabadian Wahyu Allah karena jika ada perintah tegas untuk mendirikan negara Islam maka Al-Quran dan Al-Hadits juga memberikan tuntutan terperinci tentang struktur dari institusi-institusi negara yang dimaksudkan, mulai dari sistem perwakilan rakyat, hubungan antara badan-badan legislative, eksekutif, yudikatif dengan yang lainnya. Bila demikian jelas negara tersebut tidak tahan zaman, cocok dimasa abad ke-14 yang lalu dan using di abat modern. Namun hal ini bukan berarti kita boleh membangun negara sekehendaknya dan terlepas dari ajaran pokok (fundamentalis) Islam.

Islam datang untuk memperbaiki aqidah dengan memastikan keesaan Allah dalam arti yang seluas-luasnya (tauhid), dan memperbaiki kerusakan moral masyarakat dengan menghapus perbedaan derajat manusia dan Islam membimbing manusia kearah cinta kasih, kerjasama untuk mencapai kebahagiaan dan perdamaian serta keadilan mutlak bagi umat manusia.

Negara adalah susunan suatu masyarakat yang teratur, adanya suatu masyarakat yang teratur karena adanya orang-orang yang bersama-sama merupakan dan

---

<sup>58</sup>H. Zainal Abiding Ahmad, *Ilmu Politik Islam II, Konsep Politik Islam dan Ideologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 84.

<sup>59</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Universal Cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 202.

mewujudkan masyarakat itu yang wajib teratur pula, teratur dengan ikatan hukum yang adil. Terciptannya suatu masyarakat manusia adalah suatu keharusan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Begitu juga terciptanya negara yang bersal dari sekumpulan individu-individu dan menjelma sekumpulan masyarakat manusia untuk mencapai tujuan bersama, tergantung dari jasa apa yang dipakai negara tersebut.

Dasar berdirinya suatu Negara itu berbeda-beda, sesuai dengan ideologi yang dipakainya, hal ini penting karena dasar negara merupakan landasan pokok berdirinya suatu negara, karena arah serta tujuan negara tersebut.

Politik kenegaran Islam haruslah berdasarkan ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama dan juga berdasarkan rakyat yang diperoleh dalam musyawarah. Sebagaimana gambaran yang tegas dari Prof. Gibb, “ahwa Firman Tuhan (Fox Dei) dan sabda Rasul digabung dengan suara masyarakat merupakan kekuasaan tertinggi dalam Negara Islam.”<sup>60</sup> Karena itu menurut A. Hasymi ada 2 unsur utama yang menjadi dasar Negara Islam, yaitu:

1. Faham Tauhid (pengakuan keesaan Allah)
2. Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Umat Islam)<sup>61</sup>

Kedua dasar tersebut tersimpul dalam firman, Allah SWT sebagai berikut:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ

---

<sup>60</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam II Konsepsi Politik Islam dan Ideologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). h. 84.

<sup>61</sup>A. Hasymi, *Dimana Letak Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 50.

شَفَا حُفْرَةَ مَنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.<sup>62</sup>

Dan mengensai persaudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah) ini Allah befirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.<sup>63</sup> (QS: Al-Hujuraat (49) :10).

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 93.

<sup>63</sup>*Ibid.* h. 516.

Fazlur Rahman dalam Negara Islamnya mengingatkan. “pada waktu kita hendak mengambil keputusan di dalam berbagai masalah, supaya mematuhi dan menyesuaikan dengan petunjuk Al-Qur’an,” sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>64</sup> (QS. An-Nisaa: 59).

Surat An-Nisaa ini menjelaskan tiga cara menetapkan hukum (Tri Sila) dalam mengambil keputusan dan harus ditaati. Dari Tri sila inilah yang menjadi tegaknya Negara Islam, dimana agama dan folitik bertemu dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang bersumber kepada ke Tuhanan dan sabda Rasulnya.

Rasulullah SAW memerintah kepada kita untuk selalu taat kepada Allah berkenaan urusan antara manusia dan Tuhan (Hablumminallah) dan urusan manusia dengan manusia (Hablumminanas), dimana kita sesame muslim diharuskan untuk bersatu padu jangan terpecah-belah, mematuhi pimpinan-pimpinan umat serta mentaati dan berusaha untuk hijrah serta berjuang di jalan Allah.

<sup>64</sup> Ibid. h. 87.

Sebagaimana sabda Rasulullah memrintahkan kepada kita semua lima perkara:

- a. Bersatu dengan sesame Muslim
- b. Mematuhi kata-kata Pemimpin
- c. Mentaati pemimpin
- d. Hijrah
- e. Jihad Fi Sabilillah.<sup>65</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa dasar negara Islam adalah firman Allah (Al-Qur'an), Sunnah Rasul dan Ijtihad Ulama.



---

<sup>65</sup>S. Ziyad Abbas, Edt, *Pilihan Hadits, Politik, dan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), h. 218.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI MUHAMMAD IQBAL DAN ALI ABDUR RAZIQ TENTANG AGAMA DAN NEGARA**

### **A. Biografi Muhammad Iqbal dan Karya-karyanya**

#### **1. Biografi Muhammad Iqbal**

Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan pada tanggal 9 November 1877. Suatu kota tua bersejarah di perbatasan Punjabi Barat dan Kashmir. Seperti sebagian besar tokoh-tokoh yang digambarkan dalam bukunya, ia datang dari keluarga miskin, tetapi dengan bantuan beasiswa yang diperoleh di sekolah menengah dan perguruan tinggi, ia mendapatkan pendidikan yang bagus. Setelah pendidikan dasarnya di Sialkot ia masuk Government College (Sekolah Tinggi Pemerintahan) Lahore. Ia menjadi mahasiswa kesayangan Sir Thomass Arnold yang meninggalkan Aligarh dan pindah bekerja di Government College Lahore. Iqbal lulus pada tahun 1897 dan memperoleh beasiswa serta dua medali emas karena baiknya bahasa Inggris dan Arab. Ia akhirnya memperoleh gelar M.A. dalam filsafatnya pada tahun 1899.<sup>1</sup>

Pada tahun 1908 ia berada kembali di Lahore dan di samping pekerjaannya sebagai pengacara ia menjadi dosen falsafat. Buku-bukunya *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* adalah hasil ceramah-ceramah yang diberikannya di beberapa universitas di India. Kemudian ia memasuki bidang politik dan di tahun 1930 di pilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Di dalam perundingan Meja Bundar di London ia turut dua kali mengambil bagian. Ia juga menghindari konferensi Islam

---

<sup>1</sup>Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 173-174.



yang diadakan di Yerusalem. Di tahun 1933 ia diundang ke Afghanistan untuk memberikan pembentukan Universitas Kabul.<sup>2</sup>

Berbeda dengan pembaharuan-pembaharuan lainnya, Muhammad Iqbal adalah penyair, politisi, dan filsuf besar pada abad ke-20. Iqbal dikagumi sebagai penyair klasik menonjol oleh sarjana-sarjana sastra dari Pakistan, India.<sup>3</sup> Tetapi pemikirannya mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaharuan dalam Islam.

Sama dengan pembaharuan-pembaharuan lain, ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam selama lima ratus tahun terakhir disebabkan oleh kebakuan dalam pemikiran. Hukum dalam Islam telah sampai kepada keadaan statis. Kaum konservatif dalam Islam berpendapat bahwa kepada disintegrative dan dengan demikian berbahaya bagi kestabilan islam sebagai kesatuan politik. Untuk memelihara kesatuan itu kaum konservatif tersebut lari ke syariat sebagai alat yang ampuh untuk membuat umat tunduk dan diam.

Sebab lain terletak pada pengaruh zuhd yang terdapat dalam ajaran tasawwuf. Menurut tasawuf yang mementingkan zuhd, perhatian harus dipusatkan kepada Tuhan dan apa yang berada di sebalik alam materi. Hal ini itu akhirnya membawa ke pada keadaan umat kurang mementingkan soal kemasyarakatan dalam Islam.<sup>4</sup>

Sebab terutama ialah hancurnya Baghdad, sebagai pusat kemajuan pemikiran umat Islam dipertengahan abad ke tiga belas. Untuk mengelakkan disintegrasi yang lebih mendalam, kaum konservatif melihat bahwa perlu diusahakan dan dipertahankan

---

<sup>2</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1975), h. 190.

<sup>3</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_iqbal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_iqbal), tanggal 27 Mei 2018 diakses pada 27 Mei 2018 pukul 09:23 WIB

<sup>4</sup>Harun Nasution, *Op.Cit.* h. 190-191.

keseragaman hidup sosial dari seluruh umat. Untuk itu mereka menolak segala perubahan dalam bidang syariat dan berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah ditentukan ulama terdahulu. Pintu ijtihad meteka tutup.

Hukum dalam Islam sebenarnya, demikian Iqbal tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Yang pertama bentrok terhadap pendapat bahwa keempat mazhab telah membahas segala persoalan secara final dan dengan demikian ijtihad segala persoalan secara final dan dengan demikian ijtihad tak diperlukan lagi, adalah Ibn Taimiyyah yang lahir pada tahun 1263 yaitu lima tahun sesudah jatuhnya Baghdad. Pendapat bahwa pintu ijtihad tidak tertutup dianut kemudian oleh Muhammad Abdul Wahhab. Pada zaman modern, ijtihad telah semenjak lama dijalankan di Turki. Di antara semua negara Islam, barulah umat Islam Turki yang melepaskan diri dari belenggu dogmatism. Baru bangsa Turkilah yang mempergunakan hak kebebasan berfikir yang terdapat dalam Islam.

Faham dinamis Islam yang ditonjolkan inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan di India. Dalam syair-syairnya ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedangkan hukum hidup ialah menciptakan, maka Iqbal berseru kepada umat Islam supaya bangun dan menciptakan dunia baru. Begitu tinggi ia menghargai gerak, sehingga ia menyebut bahwa kafir yang aktif lebih baik dari muslim yang suka tidur.

Dalam pembaharuan Iqbal tidak mendapat bahwa Barat yang harus menjadikan sebagai model. Kapitalisme dan imperialisme Barat tak dapat diterimanya. Barat menuntut penilaiannya, amat banyak dipengaruhi oleh materialism dan Islam dari Barat hanyalah ilmu pengetahuannya.

Kalau kapitalisme ia tolak, sosialisme malah ia terima. Ia bersikap simpatik terhadap gerakan sosialisme di barat dan di Rusia. Antara Islam dan sosialisme ia terlihat ada persamaan. Dalam hubungan ini ia pernah mengatakan: “karena *Bolsyevisme* tambah Tuhan hamper identik dengan Islam, maka saya tidak terperanjat kalau suatu ketika Islam menelan Rusia atau sebaliknya Rusia menelan Islam.” Iqbal tidak begitu saja mau menerima apa yang datang dari Barat.

Didalam riwayat hidupnya telah disinggung bahwa Iqbal menjadi Presiden Liga Muslimin di tahun 1930<sup>5</sup>. Puncak karir politik Iqbal terjadi pada 1930, dimana pada sidang tahunan All India Muslim *League* ia mengajukan untuk pertama kalinya dihadapan umat Muslim India.<sup>6</sup> Dalam hubungan ini baik disebut bahwa sebelum pergi ke Eropa ia sebenarnya adalah seorang nasionalis India. Dalam syariat-syariatnya ia menyokong kesatuan dan kemerdekaan India, dan menganjurkan persatuan umat Islam dan hindu di tanah air India.

Tetapi kemudian ia robah pandangannya. Nasionalisme ia tentang, karena dalam nasionalisme seperti yang ia jumpai di eropa, ia melihat bibit *materialistis* dan *ateisme* dan keduanya merupakan ancaman besar bagi perikemanusiaan. Nasionalisme India yang mencakup Muslim dan Hindu adalah ide yang bagus, tetapi sulit sekali untuk dapat diwujudkan. Ia curiga bahwa di belakang nasionalisme India terletak konsep *Hinduisme* dalam bentuk baru.

Di India terdapat dua umat besar, demikian Iqbal dan dalam pelaksan demokrasi Barat di India, kenyataan ini harus diperhatikan. Tuntutan umat Islam untuk memperoleh pemerintahan sendiri, di dalam atau diluar kerajaan Inggris, adalah tuntutan yang wajar. India pada

---

<sup>5</sup>*Ibid.* h. 191-193.

<sup>6</sup>Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 182.

hakekatnya tersusun dari di bangsa, Bangsa Islam dan bangsa Hindu. Umat Islam India harus menuju pada pembentukan negara tersendiri, terpisah dari negara Hindu di India.<sup>7</sup>

Setelah menyelesaikan pelajarannya, Iqbal menjadi staf dosen di perguruan tinggi pemerintahan (*Government College*), tetapi karier sastranya telah membayangi semua aspek kerjanya terlebih dahulu, pada waktu itu Iqbal mulai menulis bukunya dalam bahasa Urdu yang pertama kali mengenai ekonomi. Namun sebelum itu, ia telah mulai menerbitkan majalah Urdu *Makhzan* yang memberikan tempat berpijak sastra bagi banyak penulis berbakat yang sedang tumbuh. Dan karena Iqbal kawan dari editornya, ia harus menyumbangkan karangan syair, hampir pada setiap nomor majalah terbit. Kemasyhuran Iqbal juga menarik perhatian otoritas-otoritas dari “Anjuman Himayat Islam”, suatu organisasi memperkenalkan pendidikan modern kepada umat Muslim. Iqbal mulai membaca syairnya yang panjang-panjang pada setiap rapat tahunan dari Anjuman tersebut, dan segera kemasyhurannya tersiar sebagai penyair yang hebat dari Punjabi.

Pena Iqbal sangat sibuk pada waktu itu, dan ia menulis banyak syair mengenai berbagai macam masalah. Sayang sekali Iqbal menghilangkan banyak bait dari syair-syairnya yang ditulis pada waktu itu dalam koleksi syair-syairnya terakhir yang diterbitkan pertama kali pada waktu ia hampir berumur 45 tahun. Mungkin ia tidak senang bentuk yang tidak dewasa pada syairnya yang pertama-tama atau barang kali dengan perubahan pandangannya tentang berbagai masalah, ia tidak memperhatikan perasaan-perasaan yang dilahirkan dalam syair-syair tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Harun Nasution, *Op.Cit.* h. 193.

<sup>8</sup>*Ibid.* h. 174.

Tahun-tahun terakhir kehidupan Iqbal di liputi oleh sakit yang lama. Ia juga menyaksikan beberapa perkembangan yang tidak menyenangkan di provinsi-provinsi dimana kongres memperoleh kemenangan pada tahun 1973. Bahkan lebih menekankan jiwanya lagi adalah pandangan sementara anak-anak muda Muslim dan banyak juga ulama yang berusaha untuk memperoleh “suatu kompromi yang tidak jantan” dengan partai lawan. Namun keyakinan Iqbal tidak pernah luntur. Kalau boleh meminjam kata-kata Jinnah selamanya tidak pernah menyerahkan terhadap pujian yang murah atau yang sebenarnya tidak berhak, “ia berdiri tegak seperti batu karang dalam hari-hari yang sangat gelap”. Ia percaya bahwa umat Muslim yang banyak menghadapi hujan lebat akan dapat mengatasi ini dan menekankan bahwa jangan sampai ada penurunan bendera. Ia berdiri dengan tegak pada Liga Muslim dan merupakan salah seorang dari mereka yang mengkritik pengabungan yang setengah-setengah dari Muslim *Unionist* kepada Liga Muslim, dan merasa bahwa apabila Liga itu harus menjadi partai mass, maka ia harus berjuang melawan kaum *Unionist* yang *aristocrat*.

Iqbal tidak diberikan umur panjang untuk melihat realisasi dari impiannya tentang negara Muslim. Ia meninggal dunia pada 18 Maret 1938, sedikit kurang dari sepuluh tahun sebelum berdirinya Pakistan tetapi pada waktu perjuangan akhir terjadi di provinsi yang sangat penting, yaitu Punjab, di antara orang-orang yang menghempaskan bangunan Unionist dan meratakan jalan untuk berdirinya Pakistan ada sepuas-puasnya dari pencurahan puisi Iqbal. Memang pena lebih tajam dari pada pedang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 188-189.

## 2. Karya-karya Muhammad Iqbal

Pemikiran-pemikiran Iqbal banyak sekali kita jumpai dalam berbagai tulisannya, ialah merupakan seorang tokoh yang lengkap dan utuh. Pemikiran Iqbal tidak hanya mencakup zona sastra sebagai seni saja tetapi corak pemikirannya mencakup budaya, politik, hukum, ekonomi dan terutama agama.

Mengenai karya Iqbal yang tertulis semasa hidupnya nampak cukup banyak sekali, baik ditulis bahasa Persia, bahasa Urdu maupun dalam bahasa Inggris.

### a. Karya Muhammad Iqbal dalam bahasa Persia

- 1) *Asrar-i-Khudi* (Rahasia Pribadi), Lahore, 1915.

Diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Nicholson ini adalah karya pertama Iqbal yang membentang ajarannya mengenai diri manusia (*human ego*).

- 2) *Rumuz-i-Bekhudt* (Misteri Peniadaan Diri), Lahore, 1918.

Diterjemahkan oleh Aj. Arberry. Karya ini merupakan tambahan bagi karya *Ashar-i-Khudi* dan membicarakan masalah individu serta hubungan dengan masyarakat. Iqbal menggambarkan masyarakat Islam yang ideal baginya dasar-dasar dari masyarakat itu, tujuannya, kesempurnaannya dan cara-cara untuk mencapainya.

- 3) *Payam-i-Masyriq* (Pasar dari Timur), Lahore, 1923

Karya ini ditulisnya sebagai jawaban terhadap syair *Westoestlicher Divan* dari Goethe dan Prof. Dr. Nicholson telah menulis sebuah

artikel mengenai karya ini dengan judul “*Iqbal’s massage of The East*” dalam majalah *Islamica*.<sup>10</sup>

4) *Zabur-i-Ajam* (Wasiat Iran), Lahore, 1972

Karya ini berbagi dari dua bagian, pertama berjudul Kebun Mawar Biru dari rahasia-rahasia dan yang kedua berjudul Ghazal. Ia menulisnya sebagai jawaban terhadap Sembilan pertanyaan dair seorang sufi dalam cahaya pikiran modern. Bagian pertama dari tulian ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Prof. A.J. Arberry dengan judul Persian Psalms.

5) *Jawid Namah* (Kitab Abadi), Lahore, 1932.

Karya tulis ini menurut model Divina Comedia dari Dante, dalam perjalanan khayalannya itu Iqbal telah dituntut Maulana Jalaluddin Rumi.

6) *Pas Ceh Baid Kard Aye Aqwam-i-Syarq* (kemudian Apa yang Harus di lakukan oleh Timur), Lohore, 1936.

Karya ini dirubah dalam bentuk Mansawi, padanya dilampirkan sejumlah syair-syair Persia dengan judul umum Musafir, yang dirubahnya sewaktu ia bermukim singkat di Afganistan.

7) *Lala-i-Thur*, Lahore, 1937

Karya ini telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Prof. A.J. Arberry dengan judul *The Tulip of Sinal*, dan disiarkan oleh Royal India Sosiety, London, 1947.

---

<sup>10</sup>Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam, Alih Bahasa Oesman Raliby*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 270.



b. Karya-karya Muhammad Iqbal dalam Bahasa Urdu

1) *Ilmu Al-Iqtisad*, Lahore, 1903.

Buku yang pertama tentang Ilmu Ekonom.i

2) *Bag-i-Dara* (Genta Khalifah), Lahore, 1924.

Kumpulan karya-karya Iqbal mengenai Syair-syair.

3) *Bal-i-Jibril* (Sayap Malaikat Jibril), Lahore, 1934.

Kumpulan karangan yang didalamnya terdapat do'a penyair sewaktu ia bersembahyang di Masjid Gordova Spanyol.<sup>11</sup>

4) *Zard-i-Kalim*, Lahore 1936.

Kumpulan Syair-syair Iqbal yang meninjau dan mengecam berbagai aspek dari kehidupan modern.

5) *Armugham-I Hijaz* (Karunia dari Hijaz), Lahore 1938.

Kumpulan sajak yang berarti hadiah dari Hijaz.

6) *Iblis Ki Majis-i-Syura*, Gujarat, 1944.

Kumpulan ini bermakna permusyawaratan Iblis dan mengandung syair-syair yang merangsang pikiran.

7) *Iqbal Namah, Makatib Iqbal*, Lahore 1944.

Kumpulan surat-surat Iqbal yang dikumpulkan oleh S.H. ataulah, mengandung buah pikiran Iqbal yang dituangkannya dalam berbagai surat-surat kepada berbagai sarjana dan pemimpin bangsa.

8) *Baqiyat-i-Iqbal*, Lahore, 1954.

Mengandung syair-syair Iqbal yang selama ini belum pernah disiarkan. Diterbitkan oleh Nawa-i-Waqt.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.* h. 271-272.

c. Karya-Karya Muhammad Iqbal dalam Bahasa Inggris

1) *Development of Metaphysics*, London, 1908.

Merupakan sumbangan kepada sejarah filsafat Islam disampaikan dalam bentuk tesis untuk meraih gelar Ph.D (Doctor of Philosophy) pada Universitas Munchen. Menarik untuk diamati ciri-ciri khas pemikiran Islam yang berasal dari Persia demi menanggapi klaim Barat yang mengatakan bahwa filsafat Islam tidak lebih dari komentar terhadap pemikiran Yunani.<sup>13</sup>

2) *The Rekonstruktions of Religious Thought In Islam*, Lahore, 1934.

Pada mulanya buku ini *six Lectures on The rekonstruktions of religious thought in Islam*. Dan dalam buku ini Iqbal mencoba membangun kembali filsafat keagamaan dari Islam dengan memperhatikan tradisi-tradisi filosofis dari agama itu, dan perkembangan-perkembangan terakhir dalam berbagai bidang dari pengetahuan manusia. Untuk pertama kali telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Oesman Raliby dengan judul “Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam”, diterbitkan pertama kali oleh Bulan Bintang, Jakarta, 1966.<sup>14</sup>

d. Karya-karya Puisi Iqbal tentang Hindu-India dan Eropa.

- 1) *Ram*
- 2) *Swami ram tirath*
- 3) *Arif-i Hindi*
- 4) *Bhartari Hari*
- 5) *Nazak*

---

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 272-273.

<sup>13</sup>Muhammad Iqbal, *The Development of Metaphysics in Persia*, Alih Bahasa Joebar Ayoeb, (Bandung: Mizan, 1990), h. 13.

<sup>14</sup>Muhammad Iqbal. *Op. Cit.* h. 273

- 6) *Tarazan-i Hindi*
- 7) *Sada-i Dard*
- 8) *Himalan*
- 9) *Naya Sawalah*
- 10) *Quaim Git*
- 11) *Shakes Peare*
- 12) *Locke*
- 13) *Kant*
- 14) *Hegel*
- 15) *Schopenhaver*
- 16) *Comte*
- 17) *Napoleon*
- 18) *Goethe*
- 19) *Braowning*
- 20) *Wilhem Kai*
- 21) *Bergson*
- 22) *Tolstoy*
- 23) *Marks*
- 24) *Lennin*
- 25) *Nietzhe*
- 26) *Musolini*



Puisi-puisi ini kebanyakan bernada menghargai, sebagai rasa simpati Iqbal yang luas dan bersifat internasional.<sup>15</sup>

## **B. Biografi Ali Abdur Raziq dan Karya-Karyanya**

### **1. Biografi Ali Abdur Raziq**

Ali Abd Ar-Raziq lahir pada tahun 1888 M di wilayah Al-Mania, Mesir dan wafat tahun 1966 M. Ia lahir ditengah-tengah keluarga Feodal Mesir yang aktif dalam kegiatan politik pada *Hizb al-Ummah* yang mempunyai hubungan intim dengan perjalanan inggris. Partai ini adlaah saingan dari *Hizb al-Watan*.

---

<sup>15</sup>M.M. Syarif, *Iqbal Tentang Tuhalian dan Keindahan* (Jakarta: Mizan), h. 60-61.

Ayahnya , Hasan Abd Ar-Raziq adalah seorang pembesar (Gubernur) yang terpandang yang mempunyai pengaruh dan memiliki banyak tanah. Hasan merupakan aktivis politik yang cukup penting saat itu. Ia bahkan pernah menjabat wakil ketua *Hizb Al-Ummah* pada tahun 1907. Setelah revolusi 1919, ia dibentuk partai politik baru yang bernama *Hizb al-Abrar al-Dusturiyyah*, partai ini adalah kelanjutan dari partai *Hizb al-Umma* yang punya hubungan erat dengan inggris.

Ali ‘Abd Ar-Raziq merupakan putra dari seorang sahabat Muhammad ‘Abduh. Dia, seperti saudaranya adalah seorang penganut dan murid dari Abduh, meskipun mungkin tidak sempat belajar banyak secara langsung darinya. Intinya mengingat ketika Abduh wafat tahun 1905, ‘Ali Abd Ar-Raziq baru berusia kita-kira tujuh belas tahun. Berbeda dengan saudaranya, yakni Mustafa Abd Ar-Raziq yang pernah di Pasria dan menjabat Rektor Al-Azhar pada tahun 1945-1947, ‘ali Abd Ar-Raziq justru menjalani sisa hidupnya dengan penuh ketidak pastian.<sup>16</sup>

Dalam usia muda, sekitar 10 tahun, ‘Abd Ar-Raziq mulai belajar di Al-Azhar. Ia belajar kepada Syekh Ahmad Abu Khalwat, sahabat ‘Abduh. Ahmad Abu Khalwat, seperti juga ‘Adbuh adalah murid Jamal ad-Din al-Afgani.

Sejak 1910, ketika ia berusia 22 tahun , ‘Ali Abdu Ar-Raziq mengikuti kuliah di Al-Jami’ah Al-Mishriyyah atau Universitas Mesir (sekarang Unversitas cairo) selama hampir 2 tahun. Kuliah-kuliah terpenting yang diikutinya, diantaranya studi sejarah sastra arab dan sejarah filsafat, masing-masing diberikan oleh Prof. Nallino dan Prof. Santillana. Pada usia 23 tahun, Ali Abd

---

<sup>16</sup>Akhmad Satori, *Sulaiman Kurdi, Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Ress, 2007), h. 138- 140.

Ar-Raziq berhasil menyelesaikan program studinya di Universitas Al-Azhar.<sup>17</sup>

Setelah memperoleh ijazah Alimiyyah dari Al-Azhar tahun 1911, Ali Abd Ar-Raziq mulai memberikan kuliah di Universitas tersebut tahun 1912. Pada pertengahan tahun itu ia berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik dan ekonomi di Universitas *Oxford*. Di sana, ia hanya membaca dan mempelajari ide-ide Barat. Sebelum genap 2 tahun studi di sana, ia terpaksa harus kembali pulang ke Mesir, karena terjadi Perang Dunia I.

Pada tahun 1915 ia kembali ke Mesir dan diangkat sebagai hakim mahkamah *Syar'iyah*. Dalam kedudukannya sebagai hakim itulah, ia mengadakan penelitian yang hasilnya ia bukukan dalam sebuah karya tulis berjudul *Al-Islam Wa Usul al-Hukum Babs fi al-Kilafah wa Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian tentang Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam) yang diterbitkan pada April 1925. Karena presiden yang berhasil ditunjukannya, di samping memangku berbagai jabatan penting, ia juga sempat diangkat menjadi Menteri Wakaf.

Ali Abd Ar-Raziq adalah sarjana muslim yang pertama kali dicatat sejarah sebagai orang yang melancarkan propaganda dengan penanya menentang adanya Khilafah dan menganjurkan agar umat Islam mengambil sekularisme dan nasionalisme dalam kehidupannya.

Peristiwa paling penting dalam kehidupan Ali Abd Ar-Raziq dan menjadikan namanya termasyhur adalah penerbitan bukunya, *Al-Islam Wa Usul al-Hukum*. Begitu terbit dan dibaca para ulama dan pembaca lainnya, serta merta ia mendapatkan tanggapan dan

---

<sup>17</sup>*Ibid.* 140.

bantahan keras. Buku itu terkait erat dengan persoalan yang krusial saat itu, masalah kekhalifahan.<sup>18</sup>

Terbitnya buku Ali Abd ar-Raziq tersebut mendapat tentangan hebat dari berbagai pihak. Hal ini karena pandangannya bertolak belakang dengan consensus yang selama ini disepakati para ulama yang meyakini bahwa Khilafah adalah bagian tak terpisahkan dari Islam. Mereka menilai, ide-ide Ali Abd Ar-Raziq tersebut merusak kebenaran yang telah mapan dalam sejarah umat Islam.

Buku ini banyak mendapatkan kritik dari ulama Al-Azhar karena kritiknya terhadap sistem pemerintahan yang dilaksanakan “sekelompok umat Islam” selama sekitar 13 abad dan terhadap teori-teori politik para ulama zaman klasik dan pertengahan. Konklusi-konklusi yang dikemukakannya merupakan hasil penelitian dan analisisnya terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kepemimpinan Nabi, teori-teori politik para ulama dan praktik pemerintahan sistem khilafah. Buku tersebut diterbitkan pertama kali tahun 1925. Akibat bukunya tersebut, Ali Abdur Ar-Raziq dikutuk dan dikucilkan majelis ulama Al-Azhar, serta diberhentikan dari jabatan dan keanggotaannya sebagai hakim dan dilarang menduduki jabatan pemerintahan. Karena diberhentikan dan dilarang berkiprah di jabatan publik, dia mencurahkan waktunya pada akademi bahasan arab yang ada di Kairo.

Setelah itu rapatlah majelis ulama besar Al-Azhar akhirnya memutuskan, buku *Al-Islam Wa Usul al-Hukum* bertentangan dengan ajaran Islam. Akibatnya, ia tidak diakui lagi sebagai ulama dan namanya dihapus dari daftar ulama Al-Azhar. Ia wafat pada 22 September 1966, ketika berusia 78 tahun.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.* h. 140-142.

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 142-145.

## 2. Karya-karya Ali Abd Raziq

Syekh Ali hanya dikenal melalui kitab kecilnya yang berjudul:

- a. *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukum: Babs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan, Kajian tentang Khilafah dan Pemerintahan dalam Islma). Yang selesai ditulis pada tahun 1925. Pada waktu itu Syekh berumur sekitar 37 tahun.<sup>20</sup> Masalah pokok yang dibahas buku tersebut adalah Khilafah dari segi pertumbuhan dan kaitannya dengan ajaran Islam. Namun demikian, bagian-bagian awal buku itu mengulas pula masalah lain, yakni hunungan Islam dengan masyarakat, negara dan politik.<sup>21</sup>
- b. *Al-Ijma fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Ijma' dalam Syariat Islam) pada tahun 1947. Isinya adalah kumpulan ceramah yang disampaikan dihadapan mahasiswa program diploma Syariah Universitas Kairo. Dalam buku tersebut Syekh Ali berusaha menerangkan hakikat Ijma' kemungkinan terjadinya Ijma' legalitasnya, hukumnya dan posisi Ijma' diantara dasar-dasar hukum lain.
- c. *Min Atsar Mushthofa Abdirraziq* (Warisan-warisan Mushthofa 'Abdurraziq) pada tahun 1957. Di dalamnya, Syekh Ali menceritakan perjalanan kehidupan saudarannya dengan analisis yang tajam dan juga kritikan.

Artikel dan makalah yang belum dikumpulkan menjadi satu. Diantaranya adalah artikel dan makalah mengenai perjalanannya ke Afrika Selatan. Selain itu ada juga kumpulan ceramah di *Ma'had al-Dirasat al-Arabiyyah al-Ulya* (Institusi Studi Arab Program Pasca

---

<sup>20</sup>Kalim Sa'fan, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam, Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abd Raziq*, (Mesir: Erlangga, 2009), h. 26.

<sup>21</sup>*Op.Cit.* h.145.



Sarjana) yang membahas mengenai kehidupan Muhammad Abduh.<sup>22</sup>

### **C. Pandangan Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq Tentang Agama dan Negara**

#### **1. Pandangan Muhammad Iqbal Tentang Agama dan Negara**

Muhammad Iqbal melihat Islam sebagai agama yang memiliki banyak keistimewaan. Islam memberikan keamanan dan ketenangan bagi jiwa. Islam pun mengajak pada spiritualitas dan etos kerja pada saat yang bersamaan, sehingga melahirkan amal saleh yang dilandasi akhlak mulia. Dari sini, pandangan Iqbal tentang manusia berbeda dengan konsepsi orang-orang Eropa tentangnya. Orang-orang Eropa sekarang, baik mazhab rasionalisme maupun marxisme, tidak memperoleh ketenangan jiwa ditengah pengingkarannya terhadap Allah. Dengan demikian, orang Islam harus tetap menjadi mukmin walaupun mengadopsi peradaban-peradaban Barat yang bermanfaat.

Muhammad Iqbal berkata bahwa Islam memiliki sisi dimensi agama dan keyakinan serta prinsip-prinsip individual di sisi yang lain. Untuk dimensi yang pertama, iqbal berpendapat bahwa pada saat ini ilmu membutuhkan rekonstruksi psikologis. Agama dalam manifestasinya yang paling ideal, yaitu manifestasi sufistik, bukan hanya sebagai sekumpulan kepercayaan atau syair, tetapi juga suatu semangat yang mempersiapkan manusia zaman sekarang mampu mengantisipasi gelombang besar yang dihasilkan dunia modern. Islam pun menawarkan kecenderungan imani yang sanggup memberikan kemenangan besar, baik di dunia maupun akhirat. Pemahaman baru yang ditawarkan Islam tentang konsep manusia dari mana asalnya dan

---

<sup>22</sup>Op.Cit. h. 26-28.

kemana kembalinya juga merupakan jaminan keunggulan Islam atas masyarakat yang digerakkan oleh persaingan dan konflik, serta keunggulannya atas peradaban yang tidak memiliki kesatuan spiritualitas yakni peradaban yang diwarnai konflik antara agama dan politik.<sup>23</sup>

Iqbal berpendapat bahwa Islam sendiri menawarkan kepada kita demokrasi spiritual yang merupakan tujuan Islam modern. Alasannya, manusia membutuhkan tiga hal:

- a. Penafsiran semesta dengan pendekatan spiritualitas untuk sampai kepada Allah.
- b. Proses liberasi spirit individu dan inilah yang menyampaikannya pada konsep demokrasi.
- c. Prinsip dasar yang mengarahkan perkembangan masyarakat manusia pada perkembangan spiritualitas.

Islam memuat undang-undang politik yang menuntut ketaatan kepada Allah. Negara dalam pandangan Islam tak lain sekedar sarana untuk mewujudkan spiritualitas dalam pembangunan masyarakat manusia. Oleh karena itu, negara bukan sekedar suatu institusi kedaulatan materialistik dan pemimpin bumi. Maksudnya, negara Islam menganut bentuk teokrasi. Dengan demikian, seorang kepala negara Islam sangat dimungkinkan dikritik dan ditentang oleh masyarakat muslim. Ini bertolak belakang dengan kepala negara-negara di Eropa yang menyembunyikan kesewenang-wenangannya di bawah proteksi bentuk teokrasi Eropa.

Iqbal tidak setuju terhadap pemisahan agama dari negara karena pemisahan Allah dari alam dunia berarti pemisahan agama dari negara di dunia manusia. Pemisahan di sini sesuatu yang jauh dari nilai-nilai

---

<sup>23</sup>Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), h. 441-442.

kemanusiaan. Dalam Islam, hakikat itu satu yakni sesuatu yang bersumber dari Allah dan manifestasinya tampak di dunia materi yang pada dasarnya ciptaan Allah juga.<sup>24</sup>

Menurut Iqbal antara politik pemerintahan dan agama tidak terdapat pemisahan. Memang, pandangan ini bukanlah sesuatu yang baru dalam politik Islam. Pemikir-pemikir politik Islam Abad klasik dan Pertengahan juga menyatakan perlunya penyatuan antara agama dan negara. Abu al-Hasan al-Mawardi umpamanya, menyatakan bahwa khilafah (pemerintah) dibentuk menggantikan fungsi kenabian. Gunanya adalah demi memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Demikian al-Ghazali yang menyatakan bahwa agama dan khilafah merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan. Agama memberikan fondasi, sedangkan khilafah merupakan penjaganya.<sup>25</sup>

Bagi Iqbal, tidak ada pemisahan antara spiritual dan materil, agama dan negara. keberadaan agama adalah untuk mengembangkan kedua aspek tersebut dan menyelaraskannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Negara harus mampu menjabarkan prinsip-prinsip tauhid yang mengacu pada persamaan, kesetiakawanan dan kebebasan. Negara merupakan usaha untuk mentransformasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kekuatan ruang dan waktu.

Menurut Muhammad Iqbal, Dalam negara Islam semua anggotanya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Tiang utama negara adalah doktrin tauhid dan kenabian Muhammad SAW. Tauhid memelihara kesatuan religio politik umat Islam. Komunitas umat

---

<sup>24</sup>*Ibid.* h. 442-443.

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal dan H.Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 92-93.

Islam ada justru untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tauhid ini ke dalam realitas. “Islam, sebagai masyarakat politik, hanyalah suatu alat untuk menjadikan prinsip tauhid ini sebagai faktor yang hidup dalam kehidupan intelektual dan emosional manusia. Tauhid hanya menuntut ketaatan mutlak kepada Allah, bukan kepada raja, sebenarnya berarti ketaatan manusia pada watak idealnya sendiri.

Sementara dalam doktrin kenabian Muhammad, Iqbal menyatakan bahwa ia tidak hanya sekedar utusan Tuhan, tetapi juga teladan bagi masyarakat Muslim. Keberadaan Muhammad sebagai Nabi Negarawan dimadinah menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan agama dan negara.<sup>26</sup>

## **2. Pandangan Ali Abdur Raziq Tentang Agama dan Negara**

Bagi Ali Abd Raziq, pemerintahan adalah organisasi politik yang mengurus persoalan-persoalan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, pemerintahan bagi Ali Abd Ar-Raziq adalah institusi yang tidak memiliki otoritas terhadap wilayah agama.<sup>27</sup>

Khalifah sama sekali bukanlah urusan agama, begitu juga pengadilan tugas-tugas pemerintahan lainnya dan pusat-pusat negara. Semua itu adalah urusan politik semata, agama tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu. Agama tidak mendefenisikannya dan juga tidak mengingkarinya. Agama tidak memerintahnya juga tidak melarangnya. Agama memasrahkan masalah itu kepada kita, supaya kita merujuk pada hukum logika,

---

<sup>26</sup>*Ibid.* h. 101-102.

<sup>27</sup>Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Press, 2007), h. 157.

pengalaman umat manusia dan juga kaidah-kaidah politik.<sup>28</sup>

Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Melalui proyek ajakan reformasi pemikiran agamanya ia menuntut pemisahan agama dari negara. Islam hanyalah seruan agama untuk menyembah Allah, wilayah Islam hanyalah seputar agama dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Abdur Raziq berkata, “Islam tidak mengurus pemerintahan, negara atau kecenderungan-kecenderungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat agama, tak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memang tidak memberikan perhatian kepadanya. Demikian pula Rasul. Ia berpendapat bahwa Islam tak lebih dari kepercayaan individu spiritual dan tidak memberikan perhatian terhadap keduniaan, politik atau sosial.”<sup>29</sup>

Ali Abdur Raziq berpendapat bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintah dimana kekuasaan terpenting dan mutlak pada seorang kepala negara atau pemerintahan dengan gelar Khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW dengan kewarganegaraan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya. Jadi dari defenisi tentang khilafah di atas Ali Abdur Raziq beranggapan bahwa tugas Khilafah adalah melaksanakan hukum dan peraturan syariat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Kamil Sa’fan, *Kontroversi Khilafah Negara dan Islam Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abdur raziq*, (Mesir: Erlangga, 2009), h. 50.

<sup>29</sup>Ali Abdul Mu’ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), h. 443-444.

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal dan H.Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 114.

Menurut Ali Abdur Raziq, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang mendukung kepercayaan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk memiliki khalifah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dalil wajibnya khilafah adalah terdapat dalam surat an-Nisaa (4) ayat 59, yang memerintahkan umat beriman untuk mentaati Rasul dan Ulil Amri di antara mereka. Sebenarnya ayat tersebut tidak ada relevansinya dengan kewajiban mendirikan khilafah dalam Islam. Makna hakiki ayat tersebut, menurut Ali Abdur Raziq adalah keharusan bagi kaum Muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.<sup>31</sup>

Menurut Ali Abdur Raziq, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja. Nabi SAW tidak pernah memerintah dengan mengatasmakan suatu pemerintah tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintah tertentu. Risalah bukanlah kerajaan keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri. Ia mencontohkan Nabi Isa a.s yang mengajarkan pada umatnya "berikan hak Kaisar pada Kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan.

Nabi Muhammad SAW memang mempunyai hukumah, tetapi ia bukanlah seorang maliki (raja). Menurutny, malik yang berkuasa pada saat itu pada umumnya zalim dan kejam terhadap rakyat. Oleh karena itu Nabi tidak dapat disamakan dengan penguasa politik apa pun. Mengatakan Nabi sebagai malik berarti merendahkan dan merusak citra agung beliau. Dengan demikian, Ali Abdur Raziq berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan tidak terdapat dalam Islam. Jadi Islam tidak menentukan tentang pembentukan negara dan tidak menetapkan suatu corak atau model khusus dari suatu

---

<sup>31</sup>*Ibid.* h. 114-115.

pemerintah. Nabi hanya bertugas sebagai pembawa risalah dan tugas kerasulannya ini tidak tercakup di dalam tugas pembentukan Negara

Ali Abdur Raziq juga menyandarkan pendapatnya pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sebelas ayat Al-Qur'an yang dikutip Raziq untuk mendukung pandangannya menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa Nabi SAW tidak mempunyai kekuasaan politik. Firman-firman Allah tersebut saling menopang antara satu dengan yang lainnya dan menyatakan bahwa tugas risalah yang dibawa Nabi SAW tidak mencakup pendirian kekuasaan yang bersifat duniawi. Di antara ayat-ayat yang dikutipnya.<sup>32</sup>

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

حَفِظًا

Artinya: "Barang siapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka".<sup>33</sup> (QS. An-Nisa, 4:80).

قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ

فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا

عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

<sup>32</sup>Ibid. h. 116.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 91.



Artinya: Katakanlah: "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk Maka Sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan barangsiapa yang sesat, Maka Sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. dan Aku bukanlah seorang Penjaga terhadap dirimu".<sup>34</sup>(QS. Yunus, 10: 108)

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya: “Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan”.<sup>35</sup>(QS. Al-Ma'idah, 5 : 99)

Dari sederetan ayat-ayat yang dikemukakan di atas, Ali Abdur Raziq menyatakan bahwa Al-Qur'an dengan menolak tugas Nabi SAW sebagai pemelihara, pelindung, penjaga, pemaksa dan pengatur karena tugas-tugas tersebut di atas adalah hak dan kekuasaan raja. Beliau tidak memiliki hak memaksa orang untuk beriman. Dengan demikian Nabi tidak mempunyai kedudukan menjadi penguasa (raja). Merakalah yang memiliki kekuasaan tidak untuk memaksa dan mengatur rakyatnya

Adalah suatu kenyataan sejarah, ketika Nabi berada di Madinah telah terbentuk suatu masyarakat islam. Orang-orang Arab yang sebelumnya bercerai-berai dan bermusuhan menjadi bersaudara dan bersatu dalam suatu kekuatan yang diikat oleh kesamaan keyakinan akidah dan agama. Mereka menjadi bangsa

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 221.

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 124.

yang kuat dibawah satu pimpinan yaitu Nabi SAW sendiri. Sampai disini, logika Ali Abdur Raziq masih sejalan dengan pendapat umat Islam umumnya. Namun kemudian, ali menyatakan bahwa kepemimpinan Nabi terhadap bangsa Arab bukan dalamsatu ikatan politik. Menurutnya, Nabi tidak pernah ikut campur dalam persoalan politik bangsa Arab. Nabi tidak pernah merombak sistem pemerintah, sistem administrasi, maupun sistem peradilan yang ada. Semua diserahkan Nabi pada masyarakat.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal dan H.Amin Husein Nasution, *Op.Cit.* h. 117-118.

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DAN ALI ABDUR RAZIQ

#### A. Pandangan Pemikiran Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq Tentang Konsep Relasi Agama dan Negara

Muhammad Iqbal berpandangan *Teokrasi*, yaitu pandangan yang menganggap atau menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara negara dan agama. Tidak ada pemisahan agama dari negara karena pemisahan Allah dari alam dunia berarti pemisahan agama dari negara di dunia manusia. Pemisahan di sini sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, hakikat itu satu yakni sesuatu yang bersumber dari Allah dan manifestasinya tampak di dunia materi yang pada dasarnya ciptaan Allah juga.

Sedangkan Ali Abdur Raziq berpandangan *Sekuleris*, yakni paham yang menganggap bahwa negara dan agama tidak memiliki hubungan satu sama yang lain. Bahwa Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Islam hanyalah seruan agama untuk menyembah Allah, wilayah Islam hanyalah seputar agama dan Islam tidak mengurus pemerintahan, negara atau kecendrungan-kecendrungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat agama, tak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak.

Asumsi penulis tentang agama dan negara sama seperti pendapat Muhammad Iqbal yaitu (*Teokrasi*) saling keterikatan atau saling berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama,

karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara.

Menurut penulis Pemerintah dibentuk menggantikan fungsi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur kehidupan di dunia untuk bermasyarakat, berpolitik dan lain sebagainya. Serta agama dan negara merupakan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan karena agama memberikan fondasi sedangkan negaranya merupakan penjaganya. Jadi menurut penulis perlu di adakannya penyatuan antara agama dan negara, apabila agama dan negara di satukan maka akan menjadi satu ikatan yang kuat.

Memang, istilah negara tidak disinggung dalam Al-Qur'an maupun sunnah tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Umpamanya Al-qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosial politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk didalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, dan kehakiman. Dalam Al-Qur'an juga biasa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang atau upaya untuk menciptakan perdamaian dan menghukum tindakan kriminal. Dalam al-qur'an siyasah al-syar'iyah penegakan negara sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekati manusia kepada Allah.

Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad dengan menggunakan ar-Ra'yu, yakni pemikiran akal yang didasarkan atas kedua sumber utama. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam adalah kekal dan abadi. Ia sudah final dan tidak aka nada penambahan-penambahan baru, ia merupakan sumber baku bagi ajaran Islam bercorak universal dan berlakunya sepanjang masa. Namun Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab yang mengandung segala-galanya, dalam arti berisikan

petunjuk kepada ummat manusia hingga menyentuh segala segi kehidupan sampai kepada sedetail-detailnya.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq**

### **1. Persamaan**

Menurut Muhammad Iqbal dan Ali Abdur Raziq mereka sama-sama berpendapat bahwa: agama merupakan suatu kepercayaan seseorang (individu) kepada spiritual dan Islam merupakan seruan agama yang menuntut untuk taat kepada Allah. Serta negara merupakan mengurus tentang urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Yaitu untuk urusan manusia di dunia.

### **2. Perbedaan**

Muhammad Iqbal berpendapat bahwa tidak ada pemisahan antara spiritual dan materil, agama dan negara karena keberadaan agama adalah untuk mengembangkan kedua aspek tersebut dan menyelaraskannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Negara harus mampu menjabarkan prinsip-prinsip tauhid yang mengacu pada persamaan, kesetiakawanan dan kebebasan. Negara merupakan usaha untuk mentransformasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kekuatan ruang dan waktu.

Iqbal tidak setuju terhadap pemisahan agama dari negara karena pemisahan Allah dari alam dunia berarti pemisahan agama dari negara di dunia manusia. Pemisahan di sini sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, hakikat itu satu yakni sesuatu yang bersumber dari Allah dan manifestasinya tampak di dunia materi yang pada dasarnya ciptaan Allah juga.

Sedangkan Ali Abdur Raziq berpendapat bahwa Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Melalui

proyek ajakan reformasi pemikiran agamanya ia menuntut pemisahan agama dari negara. Islam hanyalah seruan agama untuk menyembah Allah, wilayah Islam hanyalah seputar agama dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Abdur Raziq berkata, “Islam tidak mengurus pemerintahan, negara atau kecenderungan-kecenderungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat agama, tak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memang tidak memberikan perhatian kepadanya. Demikian pula Rasul.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal berpandangan Tidak ada pemisahan agama dari negara. Karena agama dan negara merupakan dua aspek yang sangat berkaitan satu sama lainnya. Serta Ali Abdur Raziq berpandangan bahwa Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Jadi antara agama dan negara tidak ada hubungan atau kaitan sama sekali.
2. Persamaannya sama-sama berpendapat bahwa agama merupakan Kepercayaan individu kepada spiritual dan seruan untuk taat kepada Allah. Serta negara merupakan mengurus tentang urusan-urusan dunia. Sedang perbedaannya Muhammad Iqbal berpendapat bahwa agama dan negara saling berkaitan sedangkan Ali Abdur Raziq berpendapat bahwa agama dan negara tidak ada keterikatan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang akan penulis sarankan sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis skripsi ini yaitu: teori tentang negara tidak dijelaskan secara ril dan rinci dalam ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam teori tentang negara hanya memberikan dasar-dasar normatif tentang penyelenggaraan negara dengan keseluruhan sistem kenegaraannya. Oleh karenanya pengkajian tentang sistem negara dan konstitusi Islam harus diteliti dan diupayakan kemungkinan operasionalnya dalam sistem negara.

